



LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

The background of the cover is a photograph of the RRI Madiun building. The building is a multi-story structure with a light blue facade and a prominent dark blue horizontal band across the top. The words 'RRI MADIUN' are written in large, bold, yellow letters on this dark blue band. A tall antenna tower is visible on the roof. The sky is blue with scattered white clouds. In the foreground, there is a paved area with some potted plants and a green lawn.

**RRI
MADIUN**

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

LAKIP 2022

SAMBUTAN KEPALA

LPP RRI MADIUN

Tahun 2022 telah berakhir, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja sepanjang tahun 2022, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Riview atas Laporan Kinerja, Setiap instansi Pemerintah diwajibkan untuk Menyusun Laporan Kinerja (LAKIP). LAKIP disusun secara sistematis dan terukur, agar mampu memberikan informasi yang transparan dan akuntabel atas kinerja pemerintah berikut hasil-hasil yang dicapainya.

LPP RRI Madiun sebagai institusi pemerintah di bawah LPP RRI, tentu berkewajiban pula dalam hal penyusunan LAKIP tersebut. Sebagai suatu organisasi, LPP RRI Madiun memiliki arah tujuan yang tergambar dari Rencana Strategis yaitu: Tersedianya akses dan program informasi yang akurat, mempunyai nilai, pendidikan dan hiburan yang sehat guna mendukung program negara melalui layanan siaran radio, serta Terwujudnya tata kelola LPP RRI berdasarkan prinsip *good public governance khususnya di wilayah layanan siaran RRI Madiun yaitu wilayah Kota dan Kabupaten Madiun, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Caruban*.

Pada LAKIP 2022 ini, LPP RRI Madiun memberikan gambaran yang komprehensif atas tercapainya target kinerja utama yang dicerminkan dengan pencapaian target IKU, maupun kinerja lainnya yang berupa prestasi dan inovasi di sepanjang tahun 2022. Pada akhirnya, LAKIP LPP RRI Madiun 2022 ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi bagi penyusunan rencana kerja tahun berikutnya, serta menjadi dasar untuk merumuskan langkah-langkah strategi dalam rangka meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik dan berkualitas di masa mendatang.

Madiun, 26 Januari 2022

Kepala LPP Madiun



Agus Sukoyo, A.Md., S.Ap. M.Ap

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja LPP RRI Madiun disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja pemerintah dan Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX /6/8/2003 tanggal 25 maret 2003 tentang pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIP LPP RRI merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menuju LPP RRI Madiun yang akuntabel dan bekerja secara efektif dan efisien serta responsip terhadap aspirasi masyarakat yang berkembang.

Adapun Capaian yang di hasilkan oleh LPP RRI Madiun di tahun 2022 sebagai berikut: Dalam tahun 2022 LPP RRI Madiun menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan, 2 Program/Kegiatan dengan 11 indikator kinerja/Kegiatan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditetapkan dalam RENSTRA dan perjanjian Kinerja yang ditetapkan oleh Dirut LPP RRI.

Adapun indikator kinerja satker LPP RRI Madiun yang di tuangkan dalam Perjanjian kinerja satker adalah sebagai berikut :

1. Implementasi RB dengan target 8 Area Perubahan
2. Jangkauan Siaran dengan target 89 %
3. Jumlah Pendapatan PNBPN dengan target Rp. 510.948.000,-
4. Jumlah PNBPN 2022 dengan target Rp. 50.000.000,-
5. Jumlah Rupiah Murni 2022 (penyerapan Anggaran) dengan target Rp. 10.827.717.000,-
6. Kepuasan masyarakat terhadap layanan siaran dengan target 80%
7. Kinerja pelaksanaan anggaran dengan target 87 %
8. Penyediaan kualitas layanan informasi publik dengan target 85%
9. Penyelesaian pengaduan masyarakat dengan target 90%
10. Sosialisasi branding RRI kepada masyarakat/stakeholder dengan target 12 bln
11. Stakeholder yang memanfaatkan siaran RRI sebagai media yang menyebar informasi dengan target 80 Stakeholder.

Dari Indikator Perjanjian kinerja satker secara umum pencapaian tujuan sasaran yang tertuang di dalam perjanjian kinerja memperoleh hasil sebesar 94,11 % dengan predikat Memuaskan, data ini didapat dari hasil pengelolaan kinerja yang di input di Aplikasi Simlakin (Sistem Informasi laporan Kinerja) yang dibuat oleh Kantor Pusat LPP RRI, Aplikasi ini diperuntukkan bagi seluruh satker LPP RRI baik di Pusat maupun di

daerah untuk mengukur kinerja satker dengan dilampirkan bukti evidennya sebagai dasar evaluasi kinerja dari tim Apip SPI. Bila kita banding data capaian kinerja RRI Madiun dari tahun 2021 dengan 2022 dapat dilihat pada data Gambar dibawah ini:



Secara keseluruhan capaian kinerja LPP RRI Madiun memenuhi target yang ditetapkan Dirut, dan bila dibandingkan dengan tahun lalu Capaian Kinerja LPP RRI Madiun mengalami penurunan dari capaian kinerja 2021 sebesar 94,73 % menjadi 94,11 % ada penurunan sebesar 0,62 % dengan predikat capaian kinerja adalah “Memuaskan”. Bila dilihat dari gambar grafik yang ada terdapat penurunan di salah satu indikator Kinerja dan capaiannya tidak mencapai target, yaitu pada Indikator Pendapatan PNBp pada tahun 2022 dengan capaian Rp.124.435.000,- bila dibandingkan tahun 2021 dengan capaian sebesar Rp.169.495.000,- mengalami penurunan sebesar Rp.45.060.000,- dan pencapaian tidak mencapai target, hal ini dikarenakan beberapa klien yang bekerjasama dengan RRI Madiun mengalami pengurangan anggaran publikasi pasca Covid-19 dan juga kurangnya instansi yang mensosialisasikan programnya meskipun telah dilakukan sosialisasi Kerjasama program acara siaran dan apabila dilihat dari target yang diberikan oleh Kantor Pusat dalam hal ini Direktorat Layanan Pengembangan usaha sebesar Rp.510.948.000,- target ini tidak tercapai. Kedepan kinerja yang belum optimal akan dievaluasi dan segera dibuat RATL rencana aksi tindak lanjut untuk peningkatan capaian kerjanya.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN KEPALA LPP RRI MADIUN	II
IKHTISAR EKSEKUTIF	III
DAFTAR ISI	V
DAFTAR GAMBAR	VI
DAFTAR TABEL	VII
DAFTAR LAMPIRAN	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA	2
1.3 ISU STRATEGIS	5
1.4 LANDASAN HUKUM	5
1.5 SISTEMATIKA	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA	7
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1 CAPAIAN KINERJA	11
3.1.1 Implementasi RB	13
3.1.2 Jangkauan Siaran Dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Siaran RRI	20
3.1.3 Jumlah Pendapatan PNBP (LPU)	25
3.1.4 Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Keuangan)	26
BAB V PENUTUP	36
LAMPIRAN	39

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Satker LPP RRI	3
Gambar 1. 2 Data Pegawai Satker per 31 Desember 2022	4
Gambar 1. 3 Data Pegawai Tetap dan Tidak Tetap Satker	4
Gambar 2. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	9
Gambar 3. 1 Nilai Akhir SimLakin 2022	12
Gambar 3. 2 Jangkauan Siaran Programa 1	21
Gambar 3. 3 Jangkauan Siaran Programa 2	21
Gambar 3. 4 Survey Pendengar Siaran Terrestrial RRI Madiun	22
Gambar 3. 5 Survey Pendengar Siaran Terrestrial RRI Madiun	22
Gambar 3. 6 Acara Programa 1	23
Gambar 3. 7 Acara Programa 2	23
Gambar 3. 8 Survey Pelayanan Petugas RRI Madiun	24
Gambar 3. 9 Perbandingan Pagu Anggaran RRI Madiun Tahun 2021-2022	28
Gambar 3. 10 Realisasi Belanja Satker tahun 2022	28
Gambar 3. 11 Realisasi Belanja Satker tahun 2021	29
Gambar 3. 12 Grafik Realisasi Anggaran Tahun 2021 – 2022	29
Gambar 3. 13 Grafik Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2011 – 2022	29
Gambar 3. 14 Nilai Smart RRI Madiun Tahun 2022	30
Gambar 3. 15 Nilai Smart RRI Madiun Tahun 2021	31
Gambar 3. 16 Laporan Triwulanan	35
Gambar 4. 1 Capaian Kinerja RRI Madiun dari Tahun 2021 Dengan 2022	36
Gambar 4. 2 Perbandingan Kinerja 2021 dan 2022	37

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Sasaran Strategis LPP RRI	5
Tabel 1. 2 Sistematika Penulisan	6
Tabel 3. 1 Pengkategorian Capaian Kinerja	10
Tabel 3. 2 Jumlah Pendapatan PNBPN LPU	25
Tabel 3. 3 Persebaran Perubahan Pagu Anggaran LPP RRI Madiun	26
Tabel 3. 4 Rincian Pagu Anggaran RRI Madiun Tahun 2022	27
Tabel 3. 5 Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	32
Tabel 3. 6 Pendekatan E-Monev dalam kerangka logika	33

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Lampiran Laporan Kegiatan 1.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, LPP RRI (Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia) selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Lembaga sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan lembaga, capaian tujuan dan sasaran lembaga yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kementerian/Lembaga diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP LPP RRI khususnya LAKIP

Direktorat Keuangan dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Direktorat Keuangan yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja Direktur Keuangan LPP RRI.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia nomor 09 Tahun 2022 tentang sistem Kerja Dalam Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Unit Organisasi Satker memiliki mekanisme kerja sebagai berikut:

Mekanisme kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas pegawai yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan. Dengan penyederhanaan birokrasi, setiap satuan kerja terdiri dari 2 level struktur dan tim kerja yang terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana. Tim kerja terdiri dari 1 (satu) jenis atau lebih Jabatan Fungsional atau pelaksana yang dapat berasal dari lintas satuan kerja atau jika dibutuhkan dapat berasal dari lintas Instansi. Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dalam bentuk tim kerja dapat dipimpin oleh Ketua Tim.

Mekanisme kerja paska penyederhanaan struktur organisasi disesuaikan dengan strategi dari Pejabat Level 1 dan/atau Pejabat Level 2. Pejabat-pejabat tersebut memastikan kesiapan dukungan infrastruktur, tata kelola dan sumber daya yang optimal, serta memastikan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas yang ada.

Adapun mekanisme kerja paska penyederhanaan struktur organisasi terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Tahapan Perencanaan

Tahapan perencanaan dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja organisasi dapat dilakukan secara sistematis serta logis untuk mencapai tujuan dengan hasil konkrit adalah rencana kerja. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan di antaranya:

- a. Penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja, perumusan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana di bawah koordinasi Pejabat Level 2 oleh Pejabat Level 1.
- b. Penyusunan strategi pelaksanaan pencapaian target kinerja oleh Pejabat Level 2 yang terdiri dari penentuan pelaksanaan tugas dalam bentuk tim kerja atau

individu, penentuan kebutuhan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas unit serta kebutuhan atas Ketua Tim.

- c. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja oleh Pejabat Fungsional dan pelaksana.

2. Tahapan Pelaksanaan

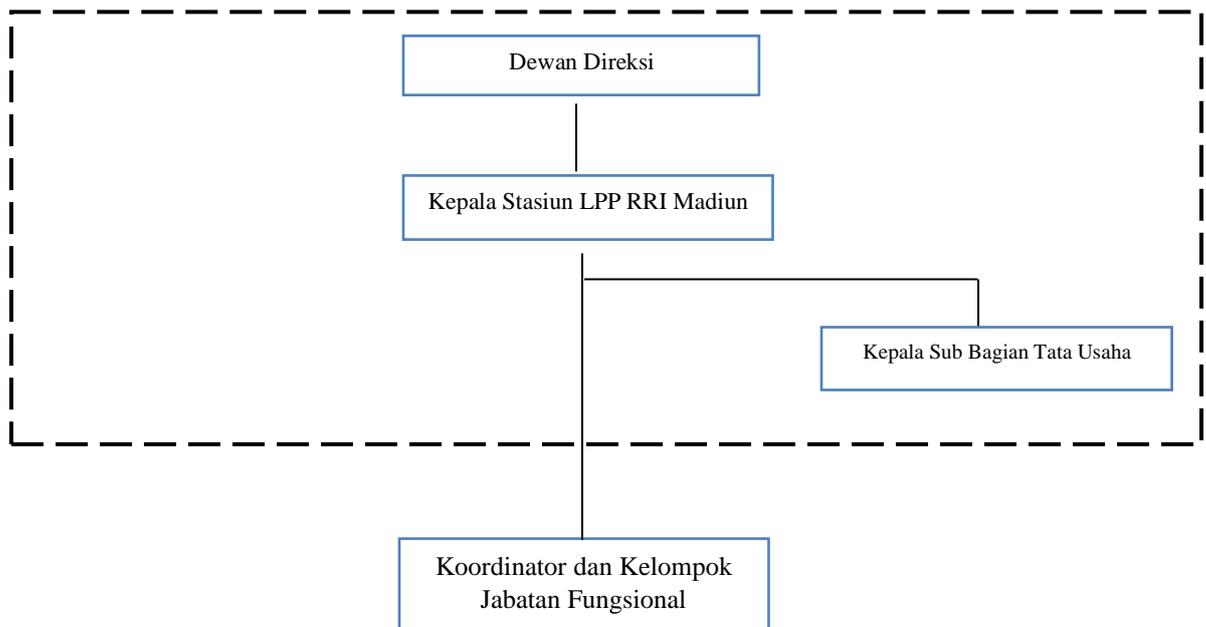
Tahapan pelaksanaan dimaksudkan untuk memastikan kegiatan dan anggaran dijalankan sesuai dengan rencana, dengan rincian:

- a. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan, pembagian peran dan pelaksanaan kegiatan oleh Pejabat Fungsional dan pelaksana.
- b. Monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan oleh Pejabat Level 2 dan/atau Ketua Tim.
- c. Penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Level 2.

3. Tahapan Evaluasi

Tahapan Evaluasi dimaksudkan untuk memastikan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang diharapkan. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan evaluasi adalah reviu atas hasil pelaksanaan tugas Tim Kerja atau individu oleh Pejabat Level 2 dan Pejabat Level 1. Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah Pejabat Level 1 menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan target yang diharapkan.

Struktur Organisasi LPP RRI Madiun dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini :

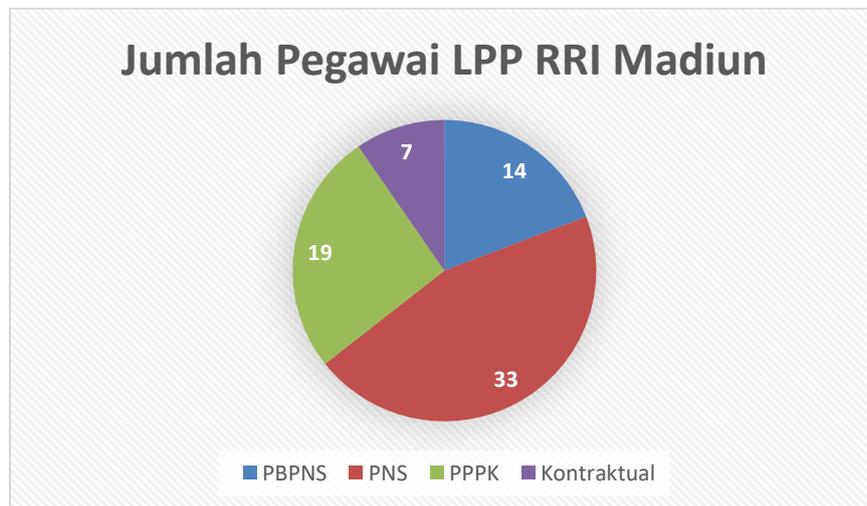


Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Satker LPP RRI

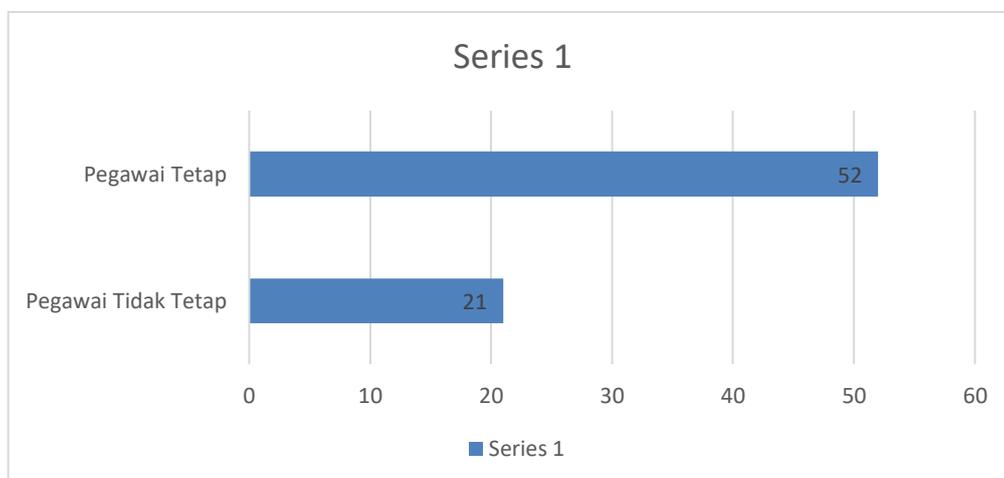
Satker terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Untuk mendukung program penyederhanaan birokrasi, dilakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, sekaligus untuk mendorong proses tata laksana pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menciptakan iklim budaya baru pelayanan publik yang lebih baik khususnya untuk perbaikan di Unit Organisasi Satker.

Sistem kerja paska penyederhanaan struktur organisasi disesuaikan dengan strategi dari Direktur Utama dan/atau Direktur Keuangan di mana Direktur Utama dan Direktur Keuangan memastikan kesiapan dukungan infrastruktur, tata kelola, dan sumber daya yang optimal serta memastikan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas yang ada.

Dalam mendukung kegiatan di Satker, berikut lampiran data pegawai dan sarana prasarana yang berada di Satker LPP RRI Madiun:



Gambar 1. 2 Data Pegawai Satker per 31 Desember 2022



Gambar 1. 3 Data Pegawai Tetap dan Tidak Tetap Satker

1.3 Isu Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia telah menetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh LPP RRI, yakni Tersedianya akses dan program informasi yang akurat, mempunyai nilai, pendidikan dan hiburan yang sehat guna mendukung program negara melalui layanan siaran radio, serta Terwujudnya tata kelola LPP RRI berdasarkan prinsip *good public governance*. Sasaran Strategis LPP RRI dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Memberikan layanan informasi yang Independen, netral dan akurat, mempunyai nilai pendidikan, dan hiburan yang sehat yang menjunjung tinggi keberagaman, identitas nasional, dan mendukung diplomasi Indonesia di tingkat global dengan berpegang pada prinsip <i>good public governance</i>	1. Tersedianya akses dan program informasi yang akurat, mempunyai nilai, pendidikan dan hiburan yang sehat guna mendukung program negara melalui layanan siaran radio 2. Terwujudnya tata kelola LPP RRI berdasarkan prinsip <i>good public governance</i>

Tabel 1. 1 Sasaran Strategis LPP RRI

1.4 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Satker LPP RRI ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020– 2024;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

1.5 Sistematika

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satker LPP RRI Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi Satker, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENGHARGAAN
	Meliputi Penghargaan yang diterima LPP RRI Madiun Periode Januari – Desember 2022
BAB V	PENUTUP
	Meliputi rangkuman capaian kinerja tahun 2022, perbandingan kinerja tahun 2021 dan 2022 dan rencana tindak lanjut ke depan terkait peningkatan kinerja satker

Tabel 1. 2 Sistematika Penulisan

BAB II.

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Renstra

Rencana Strategis (RENSTRA) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2020-2024 merupakan arah dan kebijakan LPP RRI 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Berbagai program dan kegiatan dirancang dan dirumuskan selaras dan terintegrasi dengan upaya RRI dalam mendukung Program Prioritas Nasional (PN). Dokumen ini menjadi pedoman bagi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mewujudkan RRI Sebagai Lembaga Penyiaran Publik Yang Terpercaya dan Mendunia, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu, dokumen ini juga menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan.

Keberhasilan dalam mewujudkan tujuan memberikan layanan informasi yang Independen, netral dan akurat, mempunyai nilai pendidikan, dan hiburan yang sehat yang menjunjung tinggi keberagaman, identitas nasional, dan mendukung diplomasi Indonesia di tingkat global dengan berpegang pada prinsip good public governance, dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan dan strategi yang meliputi:

1. Menjadikan RRI sebagai media utama dalam peningkatan literasi masyarakat dan radio rujukan pengetahuan yang aktual, faktual dan kredibel, melalui peningkatan kualitas isi/program siaran. Konten yang disiarkan akan selalu mengedepankan pengetahuan dan berbasis riset, sehingga selain berkualitas juga dapat menjadi sumber wawasan pengetahuan baru.
2. Menjadikan RRI sebagai media rujukan utama berita dan informasi yang akurat, netral, independen, dan objektif.
3. Menjadi radio publik yang terdepan terkait konten-konten kebudayaan dalam rangka membangun identitas bangsa, memperkuat jati diri dan budaya bangsa, serta mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal melalui berbagai acara siaran, melalui optimalisasi program khusus budaya, Programa 4 (Pro-4) dengan tagline “Ensiklopedi budaya keindonesiaan”.
4. Melakukan diversifikasi usaha dengan melakukan transformasi digital dalam penyiaran radio dengan memanfaatkan infrastruktur TIK dalam meningkatkan

layanan informasi dan hiburan berbasis multiplatform, serta meningkatkan fasilitas pendukung transformasi penyiaran radio digital di seluruh Indonesia.

5. Menjadi radio tanggap bencana sebagai media rujukan utama mitigasi bencana. Strategi ini kedepannya akan menjadikan RRI sebagai media EWS dan sarana literasi tanggap bencana bagi masyarakat. Salah satunya dengan merancang dan melaksanakan program siaran khusus mitigasi bencana melalui acara siaran Radio Tanggap Bencana “KENTONGAN” di RRI seluruh Indonesia.
6. Memperkuat dan meningkatkan peran Stasiun Siaran Luar Negeri RRI sebagai radio diplomasi bangsa (*second track diplomacy*), melalui layanan siaran dalam 9 bahasa, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Mandarin, Bahasa Jepang, Bahasa Arab, Bahasa Belanda, Bahasa Inggris, Bahasa Jerman, Bahasa Perancis dan Bahasa Spanyol, guna mendukung program prioritas nasional dalam “Meningkatkan Citra Positif Indonesia di Luar Negeri”.
7. Mewujudkan tata kelola Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja serta berorientasi pelayanan.

Strategi yang ditetapkan dalam Renstra LPP RRI 2020-2024 dalam rangka mendukung 4 (empat) agenda pembangunan nasional yang menjadi acuan Lembaga Penyiaran Publik RRI dalam menjalankan peran dan fungsinya, meliputi: (1) Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa; (2) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (3) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan (4) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini:

Unit Kerja : RRI Madiun		
No	Indikator Kinerja	Target
1	Implementasi RB	8 Area
2	Jangkauan Siaran	89 %
3	Jumlah Pendapatan PNB	510,948,000 Rupiah
4	Jumlah PNB 2022	50,000,000 Rupiah
5	Jumlah Rupiah Murni 2022	10,827,717,000 Rupiah
6	Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Siaran RRI	80 %
7	Kinerja Pelaksanaan Anggaran	87 %
8	Penyediaan Kualitas Layanan Informasi Publik	85 %
9	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	90 %
10	Sosialisasi/Branding RRI Kepada Masyarakat/Stakeholder	12 Bulan
11	Stakeholder Yang Memanfaatkan Stasiun Penyiaran RRI Sebagai Media Penyebarluasan Informasi	80 Stakeholder

Gambar 2. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

(Sumber: Aplikasi SIMLAKIN)

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi Amanah. selaku pengemban amanah Direktur Keuangan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satker LPP RRI MADIUN yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi LPP RRI .

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

No	Katagori	Rata-rata % Capaian
1	Sangat memuaskan	$100 \leq X \leq 120$
2	Memuaskan	$90 \leq X \leq 100$
3	Sangat Baik	$80 \leq X \leq 90$
4	Baik	$70 \leq X \leq 80$
5	Cukup	$60 \leq X \leq 70$
6	Kurang	$X < 60$

Tabel 3. 1 Pengkategorian Capaian Kinerja

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, LAKIP LPP RRI Madiun dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2020-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja LPP RRI Madiun dan Indikator Kinerja Utama atau Indikator Program/Kegiatan.

3.1 Capaian Kinerja

Direktur Utama LPP RRI menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari Satker LPP RRI, dimana kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis, sehingga IKU (Indikator Kinerja Utama) dalam hal ini yang terlihat pada indikator Program/Kegiatan merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Satker LPP RRI. Dalam upaya peningkatan akuntabilitas, dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu -isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas IKU Satker menunjukkan hasil sebagai berikut:

Unit Kerja : RRI Madiun				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi Tahunan
1	Implementasi RB	8 Area	8.00	100.00 %
2	Jangkauan Siaran	89 %	90.00	101.12 %
3	Jumlah Pendapatan PNB	510,948,000 Rupiah	124,435,000.00	24.35 %
4	Jumlah PNB 2022	50,000,000 Rupiah	49,999,500.00	100.00 %
5	Jumlah Rupiah Murni 2022	10,827,717,000 Rupiah	10,620,053,641.00	98.08 %
6	Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Siaran RRI	80 %	85.00	106.25 %
7	Kinerja Pelaksanaan Anggaran	87 %	91.66	105.36 %
8	Penyediaan Kualitas Layanan Informasi Publik	85 %	85.00	100.00 %
9	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	90 %	90.00	100.00 %
10	Sosialisasi/Branding RRI Kepada Masyarakat/Stakeholder	12 Bulan	12.00	100.00 %
11	Stakeholder Yang Memanfaatkan Stasiun Penyiaran RRI Sebagai Media Penyebarluasan Informasi	80 Stakeholder	80.00	100.00 %
Nilai Akhir				94.11 %

Gambar 3. 1 Nilai Akhir SimLakin 2022

(Sumber Aplikasi SimLakin)

Adapun penjabaran tiap indikator kinerja yang dihasilkan oleh LPP RRI Madiun, dapat kami jabarkan di bawah ini:

3.1.1 Implementasi RB

Reformasi birokrasi bukan sekedar kebutuhan, tetapi reformasi birokrasi sudah menjadi tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi. Pelayanan publik dari pemerintah menjadi hal yang sangat diperhatikan saat ini. Masyarakat sangat mengharapkan kontribusi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan kebijakan-kebijakannya secara efektif, efisien, profesional dan berintegritas sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat luas, seluruh instansi pemerintah mulai melakukan berbagai program pengelolaan pemerintah. Perkembangan pengelolaan pemerintah ini dilakukan agar mendorong upaya pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang baik menuju kondisi *good governance* dalam pengelolaan pemerintah. Salah satu upaya pemerintah dalam mencapai *good governance* adalah program reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi merupakan program utama yang diharapkan dapat membawa perubahan besar terhadap kinerja pemerintah kepada masyarakat. Dalam program ini dilakukan berbagai penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Hadirnya program reformasi birokrasi diharapkan dapat menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, serta memegang teguh nilai – nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Keberhasilan Reformasi Birokrasi merupakan sebuah proses perubahan yang dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan profesionalisme SDM Aparatur. Proses ini dapat dipandang sebagai perubahan dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diinginkan dalam lingkup Reformasi Birokrasi.

RRI Madiun sebagai RRI kategori stasiun Penyiaran Tipe C dalam menerapkan program Reformasi Birokrasi dan guna terwujudnya Visi RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang terpercaya dan mendunia, melakukan proses perubahan secara bertahap. Hal ini disebabkan program reformasi birokrasi

merupakan program berkelanjutan, penerapan upaya tersebut tidak luput dari kekurangan sehingga perlu adanya evaluasi guna melakukan penyempurnaan di tahun selanjutnya.

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam program reformasi birokrasi pemerintah terdapat 8 (delapan) area perubahan yaitu:

a. Organisasi

Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

b. Tata laksana

Sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

c. Sumber daya manusia aparatur

SDM aparatur berintegritas, netral, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera

d. Peraturan perundang-undangan

Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif

e. Pengawasan

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN

f. Akuntabilitas

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

g. Pelayanan public

Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Dalam melakukan reformasi birokrasi di RRI Madiun, telah dibentuk kelompok-kelompok kerja yang difokuskan pada 8 (delapan) area perubahan. Kelompok kerja ini merupakan bagian dari tim reformasi birokrasi yang terdiri dari tim pengarah, Koordinator, Kelompok Kerja dan Tim Sekretariat. Penetapan tim reformasi birokrasi LPP RRI Madiun ini telah dituangkan dalam Keputusan Kepala LPP RRI Madiun Nomor 012/RRI-MN/06/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi LPP RRI Madiun. Tim reformasi birokrasi ditugaskan untuk merumuskan kebijakan dan strategi operasional reformasi birokrasi dalam rangkaian-rangkaian pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, serta melaksanakannya dengan baik.

a. Manajemen Perubahan

Dari rencana aksi yang di susun oleh Pokja manajemen Perubahan, hal-hal yang sudah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi LPP RRI Madiun, dengan diterbitkan Surat Keputusan Kepala RRI Madiun Nomor: 012/RRI-MN/06/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi LPP RRI Madiun.
2. Melakukan pertemuan rapat antar Pokja RB seperti penyusunan rencana aksi Pokja RB, evaluasi rencana aksi dan lain-lain di lingkungan RRI Madiun
3. Melakukan publikasi informasi tentang aktivitas Reformasi Birokrasi RRI Madiun baik di Medsos (FB, Twitter, Instagram) dan membentuk WA Group RB RRI Madiun untuk mempermudah Koordinasi.
4. Menetapkan kegiatan penegakan disiplin pegawai berupa Upacara Bendera dan *Apel mingguan*

Dalam penerapan Disiplin pegawai dan peningkatan loyalitas kepada Bangsa dan Negara serta lembaga, LPP Madiun menerapkan kegiatan Upacara Bendera serta Apel yang diwajibkan kepada seluruh pagawainya untuk mengikutinya. Adapun Kegiatan nya sebagai berikut :

- a. Upaca Bendera Pada Hari Besar Nasional dan Hari Ulang Tahun RRI
- b. Upacara Hari Kesadaran Nasional Setiap tanggal 17 tiap bulannya
- c. Apel Pagi Disiplin Pegawai di hari senin setiap minggu

b. Penguatan pengawasan monitoring dan evaluasi

Dari rencana aksi yang di susun oleh Pokja Pengawasan Monitoring dan Evaluasi, hal-hal yang sudah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukang perencanaan dan penerapan untuk Pembangunan dan Penguatan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan RRI Madiun
2. Peningkatan efektifitas penanganan dan penyampaian LHKPN dan LHKASN di lingkungan RRI Madiun, Alhamdulillah LHKPN dan

LHKASN seluruh pegawai RRI Madiun sudah menyelesaikan kewajibannya menyerahkan laporan harta kekayaannya untuk periode 2022.

3. Pengelolaan data dan tindak lanjut pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelayanan siaran maupun layanan lainnya yg diberikan RRI Madiun.
4. Sosialisasi *wistleblowing system* secara internal dilingkungan RRI Madiun.

c. Penguatan akuntabilitas kerja

Dari rencana aksi yang di susun oleh Pokja Penguatan Akuntabilitas Kerja, hal-hal yang sudah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah RRI Madiun, melalui pemantapan implementasi SAKIP RRI Madiun
2. Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis *accrual* RRI Madiun, dalam pencatatan di neraca dan laporan Keuangan RRI Madiun selalu menerapkan basis *Accrual*.
3. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas guna mewujudkan belanja Negara RRI Madiun yang berkualitas, dalam pembuatan anggaran RKAKL, TOR dan RAB selalu meminta masukan dari semua pejabat struktural melalui rapat khusus membahas anggaran RKAKL tahun depan, dengan memasukkan program-program kerja tahun yang akan datang sehingga tidak ada lagi pendapat pegawai struktural yang mengatakan tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan RKAKL.
4. Penyusunan pelaporan Asset BMN LPP RRI Madiun secara Akurat dan Akuntabel, Penyusunan pelaporan asset BMN selalu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan di bawahnya sehingga pelaporan Asset BMN LPP RRI Madiun dapat dipertanggung jawabkan.

d. Penguatan kelembagaan

Dari rencana aksi yang di susun oleh Pokja Penguatan Kelembagaan, hal-hal yang sudah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Optimilisasi peran PPID RRI Madiun, Pokja Penguatan kelembagaan berkoodinasi dengan Koordinasi Bidang LPU dan Manajemen RRI Madiun berdiskusi untuk penguatan peran PPID RRI Madiun dalam rangka

memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait baik internal maupun eksternal.

2. Melakukan evaluasi tugas, fungsi dan kewenangan dilingkungan RRI Madiun, disetiap rapat struktural setiap bulannya, manajemen RRI Madiun selalu mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai dalam rangka penilaian pemberian Tunjangan kinerja pegawai dan uang makan, agar besaran Tukin sesuai dengan prestasi kerja dan kehadiran pegawai baik masuk maupun pulang kantor.
3. Melakukan Review SKP pegawai RRI Madiun Agar SKP (sasaran Kinerja Pegawai) yang di buat rutin setiap awal tahun, sesuai dengan target tupoksi yang diberikan oleh atasan langsung kepada yang bersangkutan, maka Manajemen RRI Madiun bersama dengan Pokja Penguatan kelembagaan melakukan kegiatan Review SKP Pegawai, dengan kegiatan Review ini diharapkan SKP yang dibuat oleh masing-masing pegawai tepat sasaran, dan melalui SKP kinerja pegawai dapat di ukur setiap bulannya, sehingga pada waktu penilaian SKP dapat obyektif dan sesuai dengan kinerja pegawai.

e. Penguatan tata laksana

Dari rencana aksi yang di susun oleh Pokja Penguatan Tata Laksana, hal-hal yang sudah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan sosialisasi sistem arsip dinamis kepada Karyawan RRI Madiun, Pokja penguatan tata Laksana RRI Madiun sedang mempersiapkan bahan sosialisasi sistem arsip dinamis berkaitan dengan penyimpanan arsip dan data-data penting yang dimiliki RRI Madiun.
2. Penguatan penerapan *business process e-procurement* di lingkungan RRI Madiun, Pokja penguatan tata laksana bersama manajemen sedang merencanakan penerapan business process e-procurement dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa RRI Madiun.
3. Penguatan penerapan mekanisme dan aturan main/Tatalaksana dalam pengadaan barang dan jasa dilingkungan RRI Madiun, setiap pengadaan barang dan jasa selalu menerapkan aturan main tata laksana pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan Presiden terbaru.

4. Monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa dilingkungan RRI Madiun, dari setiap pengadaan barang dan jasa yang dilakukan RRI Madiun selalu di evaluasi dan dimonitoring berkaitan dengan proses pengadaan dan penentuan harga pangadaan.
5. Pembentukan Tim penyusunan SOP RRI Madiun, agar proses pelaksanaan tupoksi masing-masing bidang/bagian dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

f. Penguatan sistem manajemen SDM aparatur

Dari rencana aksi yang di susun oleh Pokja Penguatan sistem Manajemen SDM Aparatur, hal-hal yang sudah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Menjadwalkan rapat bulanan, mingguan kepada all struktural dan karyawan RRI Madiun, adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut: a) rapat manajemen kepta dan kasubag/Koordinator di hari selasa setiap minggu, b) rapat all struktural evaluasi kinerja pegawai melalui penetapan tukin dan uang makan bulanan, c) rapat pleno karyawan setelah upacara hari kesadaran nasional dan d) rapat dilingkungan subbag/koordinator dengan mengikutsertakan manajemen (kepsta dan para kasubag/koordinator).
2. Menjadwalkan kegiatan olah raga senam dan main voly di hari jumat setiap minggu pertama, kedua, ketiga dan ke empat
3. Penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi RRI Madiun, melalui penetapan SKP masing-masing Bidang / bagian yang telah di tetapkan atasan langsung hasil kesepakatan antara atasan dan bawahannya.
4. Peningkatan kualitas SDM RRI Madiun melalui peningkatan kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani, dengan cara melakukan Tim Building RRI Madiun setelah kegiatan evaluasi program siaran RRI Madiun.
5. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan *Rewards* dan *Punishment* berbasis kinerja dilingkungan RRI Madiun, memberikan

Rewards kepada Pegawai yang berprestasi dan memberikan punishment kepada yang melanggar baik berupa hukuman ringan seperti tegoran lisan, tegoran tertulis tergantung tingkat pelanggarannya, hukuman sedang bahkan hukuman berat sesuai dengan ketentuan PP no. 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

6. Melakukan penyusunan SKP individu yang dikaitkan dengan Sasaran Kinerja Unit dan Sasaran Kinerja Organisasi
7. Penerapan Disiplin pegawai berupa ketentuan penggunaan seragam kantor waktu berdinis, ketentuan ini tidak terkecuali untuk pegawai dinas seperti penyiar, reporter dan operator teknik baik operator pemancar maupun operator studio.
8. Bersama sub koordinator SDM Pemantauan pengimputan LCK Online melalui aplikasi SIMPEG dan kehadiran pegawai secara online di lingkungan LPP RRI Madiun.

g. Penguatan peraturan perundang-undangan

Dari rencana aksi yang di susun oleh Pokja penguatan peraturan perundang-undangan, hal-hal yang sudah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan diundangkan kepada Karyawan RRI Madiun, melalui rapat pleno karyawan maupun video conference dari Kantor Pusat.
2. Melakukan pendokumentasian terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, dengan cara di tempel di madding kantor maupun di umumkan di WA group Manajemen, WA Group Struktural dan WA group karyawan RRI Madiun.
3. Melakukan arsip digital terhadap peraturan-peraturan internal maupun perundang-undangan terbaru terkait tuisi RRI Madiun.
4. Penerapan disiplin dengan memberikan pengumuman aturan-aturan disiplin pegawai, baik berupa punishment maupun reward kepada karyawan.

h. Penguatan kualitas pelayanan publik

Dari rencana aksi yang di susun oleh Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, hal-hal yang sudah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Membuat SOP tentang Standar Pelayanan Prima kepada Masyarakat yang berkunjung ke RRI Madiun.

1. Memberikan pelayanan kepada kampus/universitas dan sekolah SMA, SMP, SD, Dan TK yang berkunjung yang ingin mengetahui lebih dekat tentang RRI Madiun beserta program unggulannya berupa pemberian fasilitas narasumber, tempat pertemuan, sound system dan lainnya.
2. Penyediaan Wifi Internet gratis kepada pengunjung / tamu RRI Madiun
3. Mensosialisasikan kepada pegawai pentingnya menerapkan budaya ASN Berakhlak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkunjung.
4. Melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan RRI Madiun kepada masyarakat dan stakeholder.

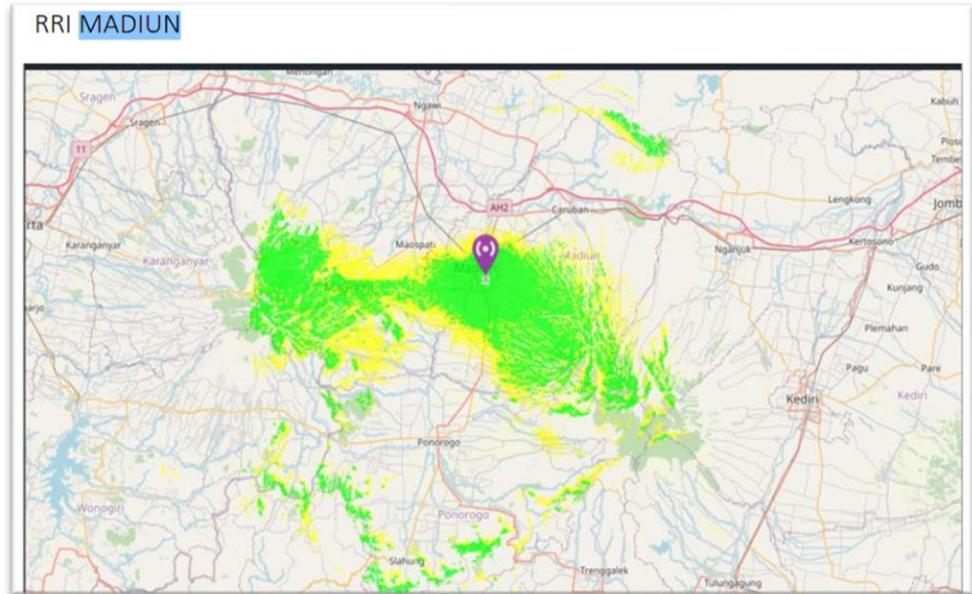
Dari penjelasan di atas tergambar bahwa penerapan Reformasi Birokrasi terkait delapan Area Perubahan di lingkungan LPP RRI Madiun sudah terlaksana semua ke depan tinggal meningkatkan kualitas penerapan Reformasi Birokrasi agar lebih masif lagi dan berdampak pada masyarakat yang menjadi target layanan LPP RRI Madiun.

3.1.2 Jangkauan Siaran Dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Siaran RRI

a. Jangkauan Siaran

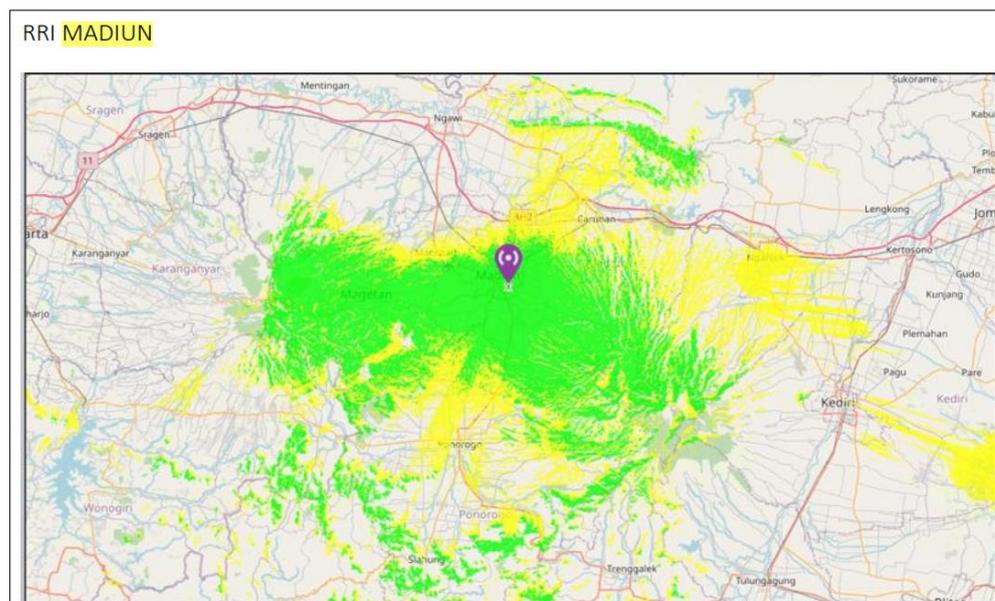
Jangkauan siaran meliputi:

- a.1 Programa.1: Menjangkau seluruh wilayah Kota Madiun, Pacitan, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Caruban, Kabupaten Madiun.



Gambar 3. 2 Jangkauan Siaran Program 1

a.2 Program.2: Menjangkau seluruh wilayah Kota Madiun.



Gambar 3. 3 Jangkauan Siaran Program 2

Terkait jangkauan siaran LPP RRI Madiun dengan target 89 % dari luas wilayah layanan jangkauan siaran LPP RRI Madiun dapat dilihat dari gambar di atas yang di ambil dari aplikasi Noutel untuk pemantauan jangkauan siaran radio dan dapat disimpulkan bahwa target 89 % tersebut tercapai, ke depan tinggal area-area blank spot yang belum terjangkau siaran RRI Madiun segera di tambah lokasi titik pemancar dan stasiun

relay agar masyarakat wilayah Pawitandirogo dapat mengakses dan terlayani siaran RRI.

b. Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Siaran RRI

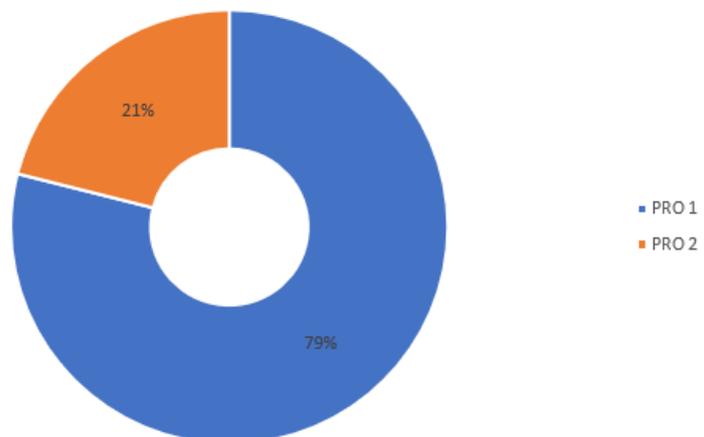
b.1 Konten Siaran secara Terrestrial

- Kepuasan masyarakat mendengarkan siaran radio terrestrial baik melalui program 1 dan program 2 dapat dilihat dari hasil survey yang telah dilaksanakan pada grafik dibawah ini :

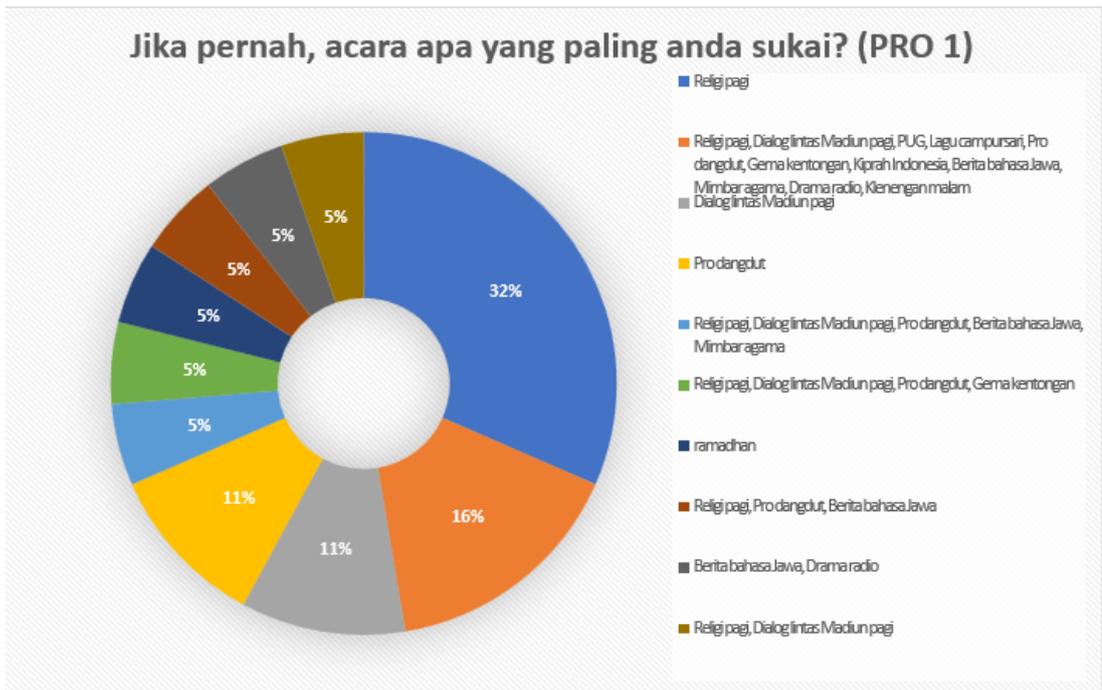


Gambar 3. 4 Survey Pendengar Siaran Terrestrial RRI Madiun

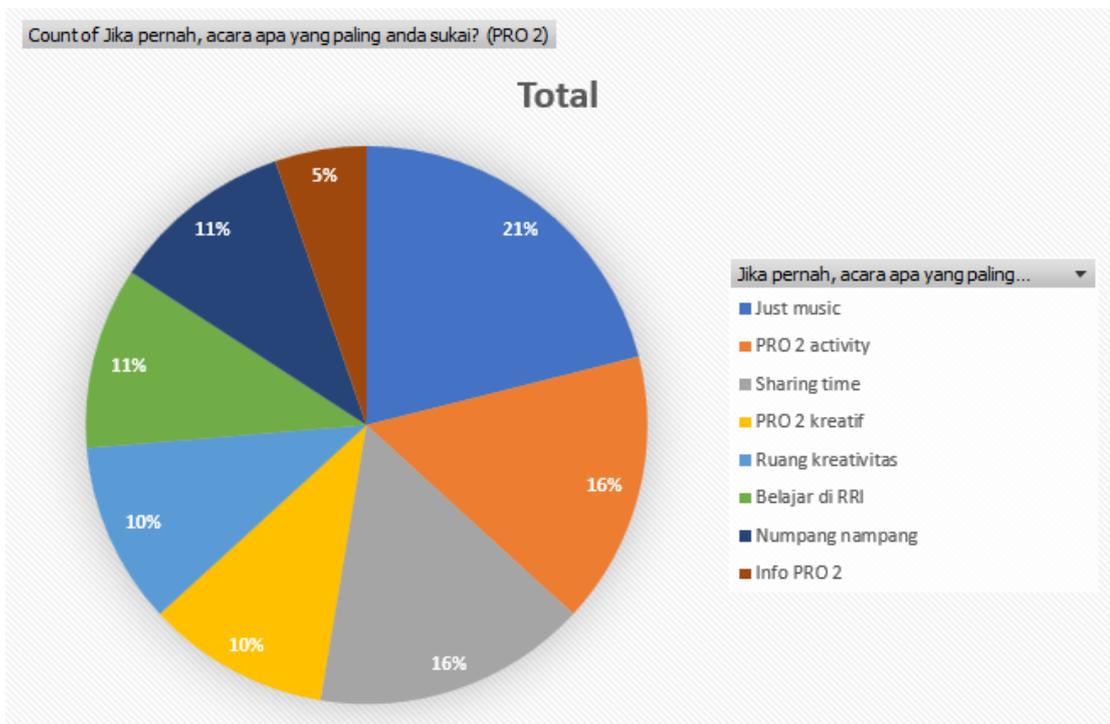
Jika pernah, program apa yang paling anda sukai?



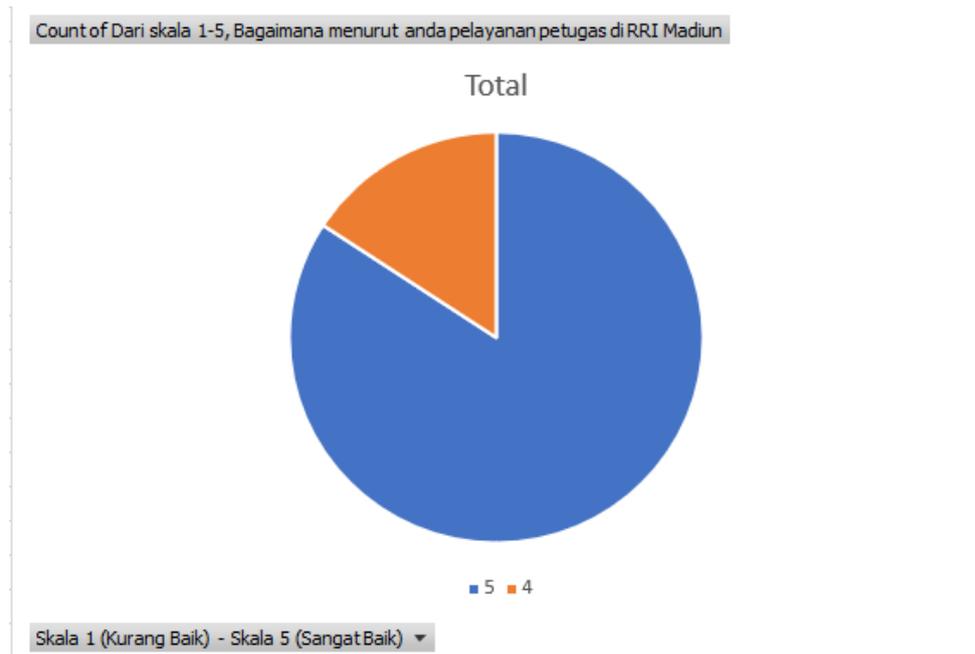
Gambar 3. 5 Survey Pendengar Siaran Terrestrial RRI Madiun



Gambar 3. 5 Acara Programa 1



Gambar 3. 7 Acara Programa 2



Gambar 3. 8 Survey Pelayanan Petugas RRI Madiun

c. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

- Keluhan pendengar siaran RRI Madiun yang dipancarluaskan melalui stasiun RRI Madiun, tidak dapat didengarkan beberapa kali dan langsung ditindaklanjuti Tim TMB. terselesaikan dengan baik
- Keluhan pendengar siaran RRI Madiun, baik program 1 (FM.99,7 MHz) maupun Program 2 (FM. 95,2 MHz) yang dipancarluaskan melalui siaran teresterial, tidak dapat didengarkan beberapa kali dan langsung ditindaklanjuti Tim TMB. terselesaikan dengan baik

d. Sosialisasi Branding dan Pemanfaatan Stakeholder

d.1 Sosialisasi branding dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya:

- a. Memanfaatkan setiap momen – momen pertemuan dengan mitra kerja
- b. Promosi melalui siaran radio berupa: Spot Iklan, Adlibs, dan Pengumuman
- c. Promosi di setiap event yang berlangsung di kota Madiun.

d. Sosialisasi promo melalui: E-Flarey, Promo Audio Visual via media Sosial (Grup WhatsApp, Instagram dan Facebook)

d.2 Pemanfaatan Stakeholder meliputi:

Tokoh pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh budaya, pelajar, mahasiswa, kelompok perempuan, disabilitas, dan kelompok / komunitas lainnya. Dibuktikan dengan daftar hadir narasumber dalam dialog maupun program – program yang melibatkan stakeholder.

3.1.3 Jumlah Pendapatan PNBP (LPU)

Berikut Pendapatan PNBP pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan pendapatan PNBP pada tahun 2021, maka data dapat dilihat pada Table dibawah ini:

BULAN	REALISASI PNBP 2021	REALISASI PNBP 2022
JANUARI	280.000	2.000.000
FEBRUARI	2.140.000	1.225.000
MARET	3.790.000	7.895.000
APRIL	22.080.000	2.950.000
MEI	32.430.000	2.300.000
JUNI	9.420.000	5.485.000
JULI	7.665.000	3.285.000
AGUSTUS	6.365.000	3.945.000
SEPTEMBER	23.375.000	80.825.000
OKTOBER	2.100.000	2.440.000
NOVEMBER	17.775.000	4.515.000
DESEMBER	41.715.000	7.570.000
TOTAL	169.495.000	124.435.000

Tabel 3. 2 Jumlah Pendapatan PNBP LPU

Pendapatan PNBP pada tahun 2022 dengan capaian Rp.124.435.000,- mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 dengan capaian sebesar Rp.169.495.000,- dikarenakan beberapa klien yang bekerjasama dengan RRI Madiun mengalami pengurangan anggaran publikasi pasca Covid-19 dan juga kurangnya instansi yang mensosialisasikan programnya meskipun telah dilakukan sosialisasi Kerjasama program acara siaran.

3.1.4 Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Keuangan)

a. Pagu Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran menyatakan bahwa pagu anggaran merupakan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DIPA untuk mendanai belanja Pemerintah Pusat dan/atau pembiayaan anggaran dalam APBN tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan data dari Satu DJA Kementerian Keuangan terdapat historis Pagu anggaran yang diberikan kepada LPP RRI Madiun Tahun 2022. Berikut merupakan tabel atas persebaran perubahan pagu anggaran LPP RRI Madiun selama Tahun 2022:

No	Keterangan	Pagu	Persentase Kenaikan/Penurunan
1.	Pagu Awal	11.865.426.000	-
2.	Revisi ke-01 s/d 02	11.865.426.000	-
3.	Revisi ke-03 s/d 04	11.915.426.000	0,42%
4.	Revisi ke-05	12.126.981.000	1,78%
5.	Revisi ke-06	11.610.481.000	- 4,26%
6.	Revisi ke-07	10.886.667.000	- 6,23%
7.	Revisi ke-08	10.887.717.000	0,01%

Tabel 3. 3 Persebaran Perubahan Pagu Anggaran LPP RRI Madiun
Tahun 2022

Berdasarkan pagu tersebut LPP RRI Madiun melaksanakan 3 Kegiatan Utama pada tahun 2022, yaitu:

- 1) 5136 – Pengelolaan Keuangan LPP RRI dengan output yang diharapkan ialah 5136.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal
- 2) 5143 – Penyelenggaraan Layanan dan Pengembangan Usaha dengan output yang diharapkan ialah 5143.AEC Kerjasama

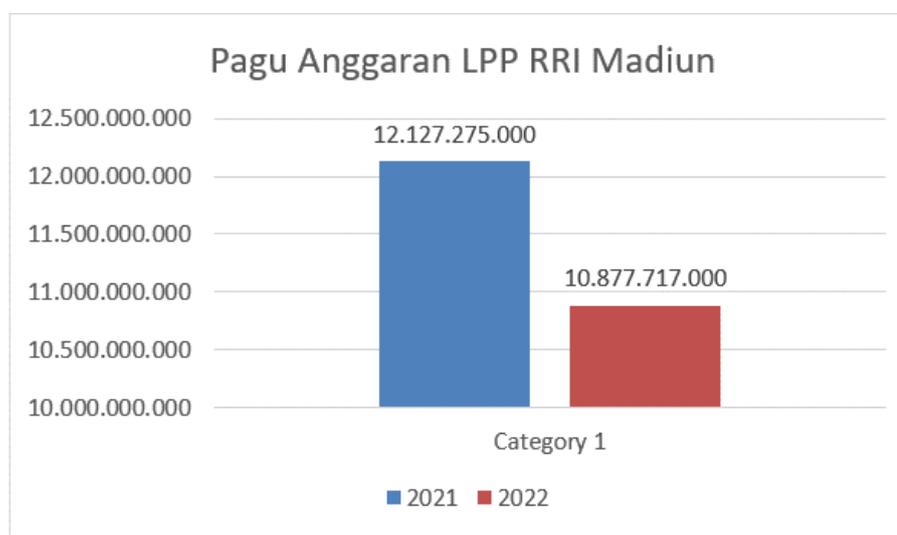
- 3) 5145 – penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Lokal , Regional dengan output yang diharapkan ialah 5145.BMA Data dan Informasi Publik, 5145.BMB Komunikasi Publik, 5145.EAE Layanan Prasarana Internal, dan 5145.QMA Data dan Informasi Publik

Maka dari itu dapat diperoleh data persebaran pembagian anggaran sebagai berikut:

Output	Jenis Belanja (Rp)		
	51 Belanja Pegawai	52 Belanja Barang	53 Belanja Modal
5136.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	7.484.169.000	2.168.352.000	
5143.AEC Kerjasama		142.424.000	
5145.BMA Data dan Informasi Publik		162.503.000	
5145.BMB Komunikasi Publik		272.415.000	
5145.EAE Layanan Prasarana Internal			550.000.000
5145.QMA Data dan Informasi Publik		97,854,000	
Total	7.484.169.000	2.843.548.000	550.000.000
Grand Total			10.877.717.000

Tabel 3. 4 Rincian Pagu Anggaran RRI Madiun Tahun 2022

Sebagai Perbandingan Pelaksanaan Anggaran tahun sebelumnya, berikut kami lampirkan perbandingan Pagu Anggaran LPP RRI Madiun tahun 2021 – 2022 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 3. 9 Perbandingan Pagu Anggaran RRI Madiun Tahun 2021-2022

b. Realisasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022

LRA (Laporan Realisasi Anggaran) adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun. Berikut Kami Sajikan Realisasi Anggaran Satker LPP RRI Madiun Tahun 2022 dan Tahun sebelumnya:

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain		Transfer
1	700134 RRI MADIUN	PAGU	7.484.169.000	2.843.548.000	550.000.000	0	0	0	0	0	0	10.877.717.000
		REALISASI	6.925.216.470 (92.53%)	2.824.631.656 (99.33%)	548.394.500 (99.71%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.298.242.626 (94.67%)
		SISA	558.952.530	18.916.344	1.605.500	0	0	0	0	0	0	579.474.374
GRAND TOTAL		PAGU	7.484.169.000	2.843.548.000	550.000.000	0	0	0	0	0	0	10.877.717.000
		REALISASI	6.925.216.470 (92.53%)	2.824.631.656 (99.33%)	548.394.500 (99.71%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	10.298.242.626 (94.67%)
		SISA	558.952.530	18.916.344	1.605.500	0	0	0	0	0	0	579.474.374

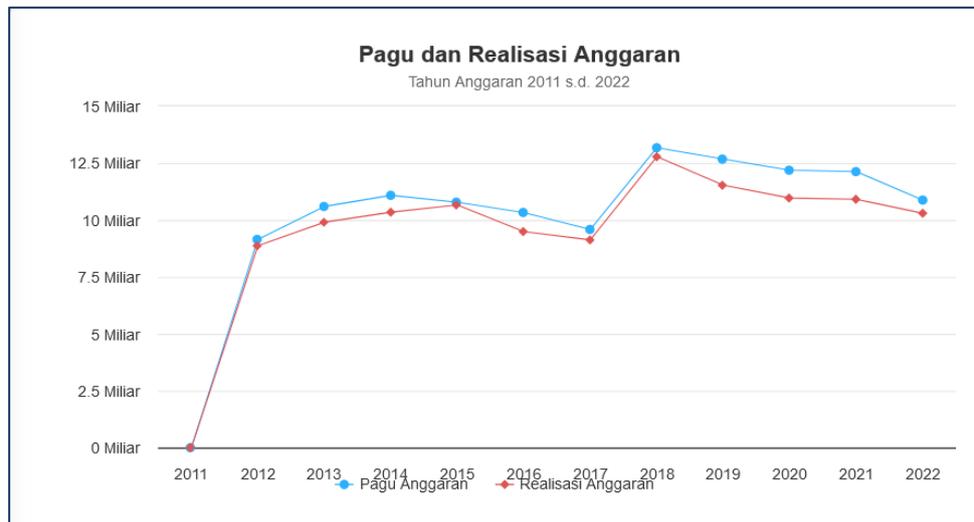
Gambar 3. 10 Realisasi Belanja Satker tahun 2022
Sumber (<https://spanint.kemenkeu.go.id/>)

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain		Transfer
1	700134 RRI MADIUN	PAGU	8,664,960,000	2,673,375,000	788,940,000	0	0	0	0	0	0	12,127,275,000
		REALISASI	7,512,966,401 (86.71%)	2,610,791,397 (97.66%)	788,940,000 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10,912,697,798 (89.98%)
		SISA	1,151,993,599	62,583,603	0	0	0	0	0	0	0	1,214,577,202
GRAND TOTAL		PAGU	8,664,960,000	2,673,375,000	788,940,000	0	0	0	0	0	0	12,127,275,000
		REALISASI	7,512,966,401 (86.71%)	2,610,791,397 (97.66%)	788,940,000 (100.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	10,912,697,798 (89.98%)
		SISA	1,151,993,599	62,583,603	0	0	0	0	0	0	0	1,214,577,202

Gambar 3. 11 Realisasi Belanja Satker tahun 2021
Sumber (<https://spanint.kemenkeu.go.id/>)



Gambar 3. 12 Grafik Realisasi Anggaran Tahun 2021 – 2022



Gambar 3. 13 Grafik Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 – 2022

Walaupun Pagu Anggaran Tahun 2022 Menurun sebanyak Rp.1.249.558.000,- dari tahun sebelumnya, Realiasi Pelaksanaan Anggaran Meningkat yang semula 89,98% di tahun 2021 menjadi 94,67%

ditahun 2022 berdasarkan Pagu Anggaran masing-masing Tahun Anggaran tersebut.

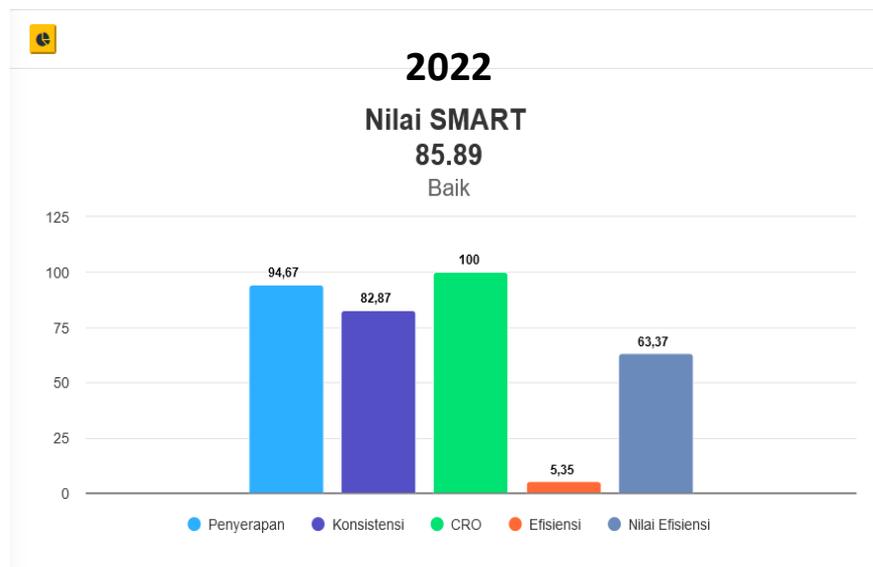
c. Kinerja Keuangan

1) Smart DJA

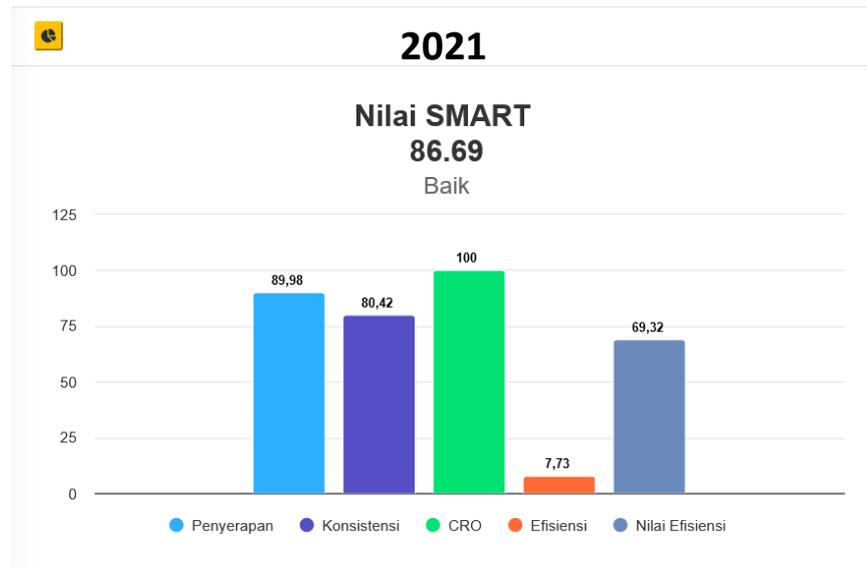
Sehubungan dengan evaluasi kinerja anggaran tahun 2022, user satker, unit eselon I dan K/L telah melakukan pelaporan capaian kinerja anggaran melalui aplikasi SMART 2022. Sumber daya manusia yang akan menggunakan aplikasi ini dari sisi operator level Kementerian/Lembaga adalah yang memiliki pemahaman tentang antarmuka komputer dan mengoperasikannya serta memahami prosedur pengisian Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran (SMART) sesuai PMK nomor 22/PMK.02/2021 Level penilaian SMART terdiri dari Kementerian Lembaga, Unit Eselon I dan Unit Satuan Kerja. Bobot masing-masing variabel pada aspek implementasi terdiri atas:

- a) Capaian Rincian Output sebesar 100%
- b) Efisiensi sebesar 63,37%
- c) Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 82,87%
- d) Penyerapan anggaran sebesar 94,67%

Berikut adalah Nilai SMART Satker LPP RRI Madiun Tahun Anggaran 2022;



Gambar 3. 14 Nilai Smart RRI Madiun Tahun 2022



Gambar 3. 15 Nilai Smart RRI Madiun Tahun 2021

2) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA.

Nilai IKPA Satker merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker. Bobot nilai kinerja untuk setiap indikator IKPA adalah sebagai berikut:

- Revisi DIPA: 10 persen
- Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen
- Penyerapan Anggaran: 20 persen
- Belanja Kontraktual: 10 persen
- Penyelesaian Tagihan: 10 persen

- Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen
- Dispensasi SPM: 5 persen
- Capaian Output: 25 persen

Perhitungan nilai IKPA dan penyediaan informasi IKPA dapat diperoleh melalui aplikasi OM-SPAN yang dapat diakses pada <http://spanint.kemenkeu.go.id/>. Kategori nilai IKPA adalah sebagai berikut:

- Sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ;
- Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; dan
- Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Berikut merupakan Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

NO	Periode	Nilai IKPA			
		Kualitas Perencanaan Anggaran	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Akhir
1.	Januari	77.69	47.46	30.56	42.69
2.	Februari	82.64	82.04	31.49	60.78
3.	Maret	86.44	93.52	65.42	80.94
4.	April	84.74	83.96	61.86	72.23
5.	Mei	86.51	88.15	64.96	76.79
6.	Juni	84.19	94.42	77.92	84.96
7.	Juli	85.54	91.20	69.54	80.26
8.	Agustus	85.77	92.56	78.73	84.22
9.	September	85.90	93.58	79.64	85.37
10.	Oktober	85.04	90.99	78.27	84.12
11.	November	83.01	94.02	90.97	89.70
12.	Desember	83.01	94.04	97.13	91.66

Tabel 3. 5 Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

3) E-Monev Bappenas

Pemantauan dan pelaporan merupakan dua aktivitas berbeda yang saling terkait dan memainkan peranan penting dalam pengendalian pembangunan. Pemantauan dan pelaporan mendorong perencanaan yang berkualitas diimplementasikan dengan kualitas yang baik, sehingga intervensi yang direncanakan dan dilaksanakan dapat berkontribusi pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L) dan pelaporannya merupakan sebuah aksi kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan Renja-K/L dalam kerangka pengawalan pelaksanaan Renja-K/L, baik di level makro, meso dan mikro. Pemantauan dan pelaporannya tersebut diharapkan dapat meningkatkan tidak saja kualitas implementasi rencana namun juga dalam kerangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan khususnya atas intervensi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga.

Aplikasi e-Monev sebagai media pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja-K/L merupakan instrumen yang tidak saja mendukung proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan, namun juga mendukung akuntabilitas intervensi pemerintah, baik Renja-K/L maupun RKP. Pendekatan E-Monev dalam kerangka logika adalah sebagai berikut:

Komponen	
1.	Input
2.	Proksi dari proses
Output	
1.	Rincian Output
Outcome	
1.	Indikator Kinerja Kegiatan
2.	Indikator Kinerja Program

Tabel 3. 6 Pendekatan E-Monev dalam kerangka logika

LAPORAN TRIWULANAN

Tahun Anggaran : 2022
Kementerian/Lembaga : 116 - LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
Unit Kerja Eselon I : 01 - Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
Triwulan : Triwulan IV (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR Rincian Output	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN			
					ANGGARAN		FISIK	PROGRES PELAKSANAAN
					Realisasi	%		
5136.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal								
1	5136.EBA.994 Layanan Perkantoran	2	Layanan	9,652,521,000	9,141,084,806	94.70	2	96.3 %
5143.AEC Kerja sama								
2	5143.AEC.001 Layanan Komunikasi Publik	1	Kesepakatan	18,490,000	18,490,000	100.00	1	100 %
3	5143.AEC.002 Layanan Publik LPP RRI	1	Kesepakatan	115,114,000	114,334,000	99.32	1	99.3 %
4	5143.AEC.003 Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak Siaran dan Non Siaran	1	Kesepakatan	8,820,000	8,790,125	99.66	1	99.7 %
5145.BMA Data dan Informasi Publik								
5	5145.BMA.001 Penunjang Siaran Lokal Regional dan Nasional (Regular)	1	layanan	162,503,000	161,078,000	99.12	1	99.4 %
5145.BMB Komunikasi Publik								
6	5145.BMB.U01 Program Siaran Dialog Interaktif didalam Studio	1	layanan	95,004,000	94,804,000	99.79	1	99.1 %
7	5145.BMB.U02 Program Siaran Dialog Interaktif diluar Studio	1	layanan	19,792,000	19,792,000	100.00	1	100 %
8	5145.BMB.U03 Program Produksi Spot	1	layanan	4,680,000	4,680,000	100.00	1	100 %
9	5145.BMB.U04 Program Produksi Buletin Berita	1	layanan	42,096,000	42,096,000	100.00	1	100 %
10	5145.BMB.U05 Program Siaran Produksi Feature	1	layanan	8,064,000	8,064,000	100.00	1	100 %
11	5145.BMB.U06 Program Produksi Laporan Mendalam	1	layanan	12,000,000	12,000,000	100.00	1	100 %
12	5145.BMB.U07 Program Siaran Langsung Reportase	1	layanan	22,920,000	22,920,000	100.00	1	100 %
13	5145.BMB.U08 Program Produksi Majalah Udara	1	layanan	5,616,000	5,616,000	100.00	1	100 %
14	5145.BMB.U10 Program Produksi Sandiwara Radio	1	layanan	9,145,000	9,145,000	100.00	1	100 %
15	5145.BMB.U11 Program Siaran Pergelaran	1	layanan	14,592,000	14,592,000	100.00	1	100 %
16	5145.BMB.U12 Program Produksi Komentar	1	layanan	22,080,000	21,980,000	99.55	1	99.7 %
17	5145.BMB.U13 Program Produksi Dokumenter	1	layanan	2,904,000	2,904,000	100.00	0	100 %

NO	NOMENKELATUR Rincian Output	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN			
					ANGGARAN		FISIK	PROGRES PELAKSANAAN
					Realisasi	%		
18	5145.BMB.U14 Program Produksi Kaleidoskop	1	layanan	1,550,000	1,505,000	97.10	1	95.5 %
19	5145.BMB.U16 Program Produksi Filler	1	layanan	7,968,000	7,968,000	100.00	1	100 %
20	5145.BMB.U17 Program Produksi Report On The Spot (ROS)	1	layanan	984,000	984,000	100.00	1	100 %
21	5145.BMB.U18 PROGRAM SIARAN PENDEKATAN DEVELOPMENT BROADCASTING UNIT (DBU)	1	layanan	3,020,000	3,020,000	100.00	1	100 %
5145.EAE Layanan Prasarana Internal								
22	5145.EAE.002 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	61	unit	550,000,000	548,394,500	99.71	61	99.7 %
5145.QMA Data dan Informasi Publik								
23	5145.QMA.002 Program Produksi Dokumenter Prioritas Nasional	1	layanan	52,299,000	52,299,000	100.00	1	100 %
24	5145.QMA.003 Program Produksi Siaran Tanggap Bencana Prioritas Nasional	1	layanan	45,555,000	45,355,000	99.56	1	99.6 %

Gambar 3. 16 Laporan Triwulanan

Terkait dengan target kinerja anggaran bila dilihat dari penjelasan diatas dan data-data kinerja yang dihasilkan, target kinerja keuangan LPP RRI Madiun tercapai dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian pengelolaan anggaran dari dari sumber PNBPN dengan target sebesar Rp.50.000.000,- terealisasi sebesar Rp.49.999.500,- atau prosentasi capaian sebesar 99.99 %.
2. Capaian pengelolaan anggaran dari sumber Rupiah Murni dengan target sebesar Rp. 10.827.717.000,- terealisasi Rp. 10.620.053.641,- atau prosentasi capaian sebesar 98.08 %
3. Kinerja pelaksanaan anggaran dari target nilai 87 capaian tahun ini adalah sebesar 91.66.

Dari data di atas dapat disimpulkan capaian target kinerja anggaran di LPP RRI Madiun telah melampaui target tahun 2022.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPP RRI Madiun Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik Satker LPP RRI Tahun 2022. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LAKIP Satker LPP RRI Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Satker dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 LPP RRI Madiun menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan, 2 Program/Kegiatan dengan 11 indikator kinerja/Kegiatan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran yang tertuang di dalam perjanjian kinerja memperoleh hasil sebesar 94,11 % dengan predikat Memuaskan, data ini dapat dari hasil pengelolaan kinerja yang di input di Aplikasi Simlakin (Sistem Informasi laporan Kinerja) yang di buat oleh Kantor Pusat LPP RRI, yang di peruntukkan bagi seluruh satker LPP RRI baik di Pusat maupun di daerah. Adapun bila kita banding data capaian kinerja RRI Madiun dari tahun 2021 dengan 2022 adalah sebagai berikut:

Tahun		2022			2021		
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi Tahunan	Target	Realisasi	Realisasi Tahunan
1	Implementasi RB	8 Area	8.00	100.00 %	8 Area	7.00	87.50 %
2	Jangkauan Siaran	89 %	90.00	101.12 %	87 %	60.50	69.54 %
3	Jumlah Pendapatan PNB	510,948,000	124,435,000.00	24.35 %	510,960,000	169,495,000.00	33.17 %
4	Jumlah PNB 2022	50,000,000	49,999,500.00	100.00 %	20,000,000	20,000,000.00	100.00 %
5	Jumlah Rupiah Murni 2022	10,827,717,000	10,620,053,641.00	98.08 %	12,107,275,000	11,760,268,252.00	97.13 %
6	Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Siaran RRI	80 %	85.00	106.25 %	75%	82,54	110,05%
7	Kinerja Pelaksanaan Anggaran	87 %	91.66	105.36 %	85%	80,12	94,26%
8	Penyediaan Kualitas Layanan Informasi Publik	85 %	85.00	100.00 %	80%	102,81	128,51%
9	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	90 %	90.00	100.00 %	85 %	0	0%
10	Sosialisasi/Branding RRI Kepada Masyarakat/Stakeholder	12 Bulan	12.00	100.00 %	12 Bulan	12.00	100.00 %
11	Stakeholder Yang Memanfaatkan Stasiun Penyiaran RRI Sebagai Media Penyebarluasan Informasi	80 Stakeholder	80.00	100.00 %	70 Stakeholder	89	127,14%
Nilai Akhir				94.11 %			94.73 %

Gambar 4. 1 Capaian Kinerja RRI Madiun dari Tahun 2021 Dengan 2022



Gambar 4. 2 Perbandingan Kinerja 2021 dan 2022

Dari data tabel dan diagram perbandingan dari tahun 2021 dan 2022 dapat disimpulkan bahwa: Secara keseluruhan capaian kinerja LPP RRI Madiun memenuhi target yang ditetapkan Dirut, dan bila dibandingkan dengan tahun lalu Capaian Kinerja LPP RRI Madiun mengalami penurunan dari capaian kinerja 2021 sebesar 94,73 % meningkat menjadi 94,11 % ada penurunan sebesar 0,62 % dengan predikat capaian kinerja adalah “ Memuaskan”. Lalu bila di lihat dari table dan grafik yang ada terdapat penurunan di salah satu indikator Kinerja dan capainya tidak mencapai target, yaitu di indikator Pendapatan PNBP pada tahun 2022 dengan capaian Rp.124.435.000,- bila dibandingkan tahun 2021 dengan capaian sebesar Rp.169.495.000,- mengalami penurunan sebesar Rp.45.060.000,- hal ini dikarenakan beberapa klien yang bekerjasama dengan RRI Madiun mengalami pengurangan anggaran publikasi pasca Covid-19 dan juga kurangnya instansi yang mensosialisasikan programnya meskipun telah dilakukan sosialisasi Kerjasama program acara siaran. Namun bila dilihat dari target PNBP yang telah ditetapkan, PNBP LPP RRI Madiun baik tahun 2021 maupun 2022 masih jauh dari target. Kedepan kinerja yang belum optimal akan dievaluasi dan segera dibuat RATL (rencana aksi tindak lanjut) untuk peningkatan capaian kerjanya.

Terkait dengan anggaran, perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal, sehingga dalam pelaksanaan beberapa program kegiatan masih harus dilakukan penyesuaian (revisi).

Terkait jangkauan siaran LPP RRI Madiun masih adanya daerah Blank spot di wilayah layanan Siaran LPP RRI Madiun dikarenakan kontur wilayah yang berbukit dan kemampuan pemancar RRI yang kapasitas jangkauannya kurang.

Langkah ke depan segera dibuat RATL rencana aksi tindak lanjut untuk peningkatan capaian kinerjanya, terkait peningkatan target PNBPN LPP RRI Madiun berupa rencana aksi:

1. Mengoptimalkan peran seksi LPU untuk berkolaborasi dengan stakeholder baik pemda maupun mitra kerja instansi vertikal dan pihak swasta untuk melakukan sosialisasi program-programnya dan mengiklankan produk-produknya di RRI Madiun.
2. Membuat company profile yang mencerminkan kekuatan LPP RRI Madiun dan dapat meyakinkan bahwa RRI Madiun dapat membantu mempublikasikan program dan produk dari mitra kerja
3. Menambah personal tenaga marketing dengan melakukan anjab dan ABK dari seksi dan subbag yang kelebihan personal

Sedangkan untuk mengatasi daerah blank spot di beberapa wilayah yang menjadi jangkauan layanan siaran RRI Madiun, rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Mengoptimalkan pemancar yang dimiliki LPP RRI Madiun dengan cara melakukan pemeliharaan secara berkala dan memaksimalkan kapasitas Pemancar yang ada
2. Mengusulkan pengadaan pemancar baru dengan kapasitas yang memadai untuk melayani wilayah – wilayah yang wilayah jangkauan siarannya hamper 200 kalipat dari wilayah Madiun.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Lampiran Laporan Kegiatan